



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YASRI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 105784

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.050.000.000

1. Tanah Seluas 20000 m2 di BULUKUMBA, WARISAN Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 712 m2 di BONE, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 400 m2 di BONE, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 117.000.000

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 60.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 232.386.136

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.459.386.136

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.459.386.136

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **25 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.